

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LatarBelakang

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh pemanfaatan teknologi informasi, sistem pengendalian internal dan kompetensi sumber daya manusia terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Seiring perkembangan Akuntansi Sektor Publik di Indonesia, maka kebutuhan akan akuntabilitas sebagai wujud pertanggungjawaban kepada masyarakat atas kinerja pemerintah menjadi suatu tuntutan yang umum. Menguatnya tuntutan tersebut mengharuskan lembaga pemerintah memberikan informasi atas aktivitas dan kinerjanya kepada publik.

Sebagai wujud pertanggung jawaban tersebut, upaya yang dapat dilakukan adalah dengan menyampaikan pertanggung jawaban berupa laporan keuangan. Hal ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Upaya yang nyata untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah adalah dengan menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan (Soimah dan Aprillah, 2014).

Ada banyak pihak yang mengandalkan informasi keuangan yang disajikan dan dipublikasikan oleh pemerintah daerah dengan kegunaan berbeda-beda, sehingga laporan yang disajikan tersebut harus berkualitas. Laporan keuangan dikatakan berkualitas jika laporan keuangan yang disajikan tersebut memenuhi syarat normatif yaitu relevan, andal, dapat dibandingkan dan dapat dipahami (Soimah, 2014).

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dilaporkan satu tahun sekali dan akan mendapat opini dari Badan Pengawas Keuangan (BPK) yaitu Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), Wajar Dengan Pengecualian (WDP), Tidak Wajar (TW), Tidak Memberi Pendapat (TMP). Laporan keuangan pemerintah yang belum memenuhi standar akuntansi dan masih ditemukannya penyimpangan-penyimpangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan membuat tuntutan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan yang baik semakin meningkat (Listiani, 2018). Sebagaimana diketahui bahwa permasalahan mengenai kualitas laporan keuangan ditandai dengan adanya kasus tentang kualitas laporan keuangan pemerintah daerah di Indonesia. Hal ini merupakan bukti kurangnya pemanfaatan teknologi informasi, dan buruknya sistem pengendalian internal, serta kurangnya kompetensi sumberdaya manusia sehingga mampu menimbulkan pengaruh terhadap kualitas laporan keuangan yang dibuat (Artana, 2016).

Salah satu kasus mengenai kualitas laporan keuangan pemerintah daerah yang di lansir website DISKOMASANDIPada tanggal (21/5), Wali Kota Ternate Dr. M Tauhid Soleman, M.Si menghadiri acara Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan atas LKPD (Laporan Keuangan Pemerintah Daerah) tahun anggaran 2020 pada Kabupaten/Kota Se-Maluku Utara yang diselenggarakan di Kantor BPK RI (Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia) Perwakilan Provinsi Maluku Utara.

Pada acara penyerahan hasil pemeriksaan laporan keuangan Pemerintah Kota Ternate untuk ketujuh kalinya sejak tahun 2014, kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas laporan hasil pemeriksaan

keuangan pemerintah daerah tahun 2020 oleh Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Maluku Utara

BPK telah melakukan pemeriksaan atas laporan keuangan pemkot tahun anggaran 2020 yang diawali dengan pemeriksaan intern dan dilanjutkan dengan pemeriksaan substantif. Meskipun dari hasil laporan keuangan pemkot memperoleh opini WTP, namun dari hasil pemeriksaan BPK masih di temukan beberapa kelemahan baik ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan yang berlaku maupun kelemahan sistem intern.

Disamping itu juga pemkot juga membutuhkan pendamping dari BPK, karena adanya perubahan sistem pengelohan keuangan dan dapat menimbulkan resiko salah saji dalam penyajian laporan keuangan. Pemanfaatan Teknologi Informasi Akuntansi sangat penting dalam menciptakan laporan keuangan yang berkualitas. Pemanfaatan sistem informasi akuntansi keuangan daerah merupakan penerapan sistem mulai dari pengelompokan, penggolongan, pencatatan dan pemrosesan aktivitas keuangan pemerintah daerah kedalam sebuah laporan sebagai suatu informasi yang nantinya dapat digunakan oleh pihak tertentu dalam pengambilan keputusan oleh masing- masing SKPD dalam proses penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah (Artana,2016).

Pemanfaatan teknologi informasi juga sangat penting bagi kualitas laporan keuangan karena dengan adanya pemanfaatan teknologi informasi pemerintah daerah akan lebih cepat dalam proses pencatatan, penyajian, analisa lkpD untuk mengontorisasi transaksi-transaksi akuntansi kedalam sebuah laporan keuangan untuk mendukung pengambilan keputusan dengan keadaan keuangan dalam suatu proses tertentu.

Penelitian yang dilakukan oleh Anggraini (2017) Wulan, dkk (2021) Rianita dan Widiastuti (2020) menyimpulkan bahwa pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Namun berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Apriansya dan Yuliati, (2021) Pangestu, dkk (2019) Propto (2010) menyimpulkan bahwa pemanfaatan teknologi informasi tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

Sistem Pengendalian Internal merupakan suatu perencanaan yang meliputi struktur organisasi dan semua metode dan alat-alat yang digunakan di dalam perusahaan dengan tujuan untuk menjaga keamanan harta milik perusahaan, memeriksa ketelitian, dan kebenaran data akuntansi, efisiensi dan membantu mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen yang telah ditetapkan (Askikarno p, 2019).

Sistem pengendalian internal adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan yang memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamatan aset Negara dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan Askikarno, P (2019) Pengawasan internal Kabupaten/Kota dilakukan oleh Aparat pengawas Internal pemerintah yang disebut inspektorat kabupaten/Kota. Inspektorat Kabupaten/Kota melakukan pengawasan terhadap seluruh kegiatan dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi satuan kerja perangkat daerah (SKPD) kabupaten kota yang didanai dengan APBD kabupaten atau kota (Rohmah, dkk, 2020).

Kualitas laporan keuangan juga sangat ditentukan oleh sistem pengendalian internal karena dengan adanya pengendalian internal yang baik pemerintah dapat mencapai sasaran dan juga dapat menyajikan laporan keuangan yang andal, menjalani huku atau peraturan yang berlaku agar diperlakukan kebijakan dan prosedur sistem pengendalian internal.

Penelitian yang di lakukan oleh Ahsani (2016) Siahian dan Simanjuntak, (2020) Sanjaya (2017) menyimpulkan bahwa sistem pengendalian internal berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan. Namun berbeda dengan Penelitian yang di lakuakan oleh Philapdelpia (2020), Inapaty dan Martiningsi, (2016) Ardianto dan Evoris (2019) menyimpulkan bahwa sistem pengendalian internal tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

Kompetensi merupakan kemampuan menjalankan tugas atau pekerjaan dengan dilandasi oleh pengetahuan, keterampilan, dan di dukung oleh sikap yang menjadi karakteristik individu Wibowo (2014) Mathis dan Jackson (2001) mengilustrasikan bahwa kompetensi ada yang terlihat dan ada yang tersembunyi. Pengetahuan lebih terlihat, dapat dikenali oleh perusahaan untuk mencocokkan orang dengan pekerjaan. Keterampilan walaupun sebagian dapat terlihat sebagian lagi kurang teridentifikasi, akan tetapi kompetensi tersembunyi berupa kecakapan yang mungkin lebih berharga dapat meningkatkan kinerja

Kualitas laporan keuangan sangat ditentukan oleh kompetensi sumber daya manusia, karena dengan sumber daya manusia yang kompeten, maka akan dihasilkan laporan keuangan yang tepat waktu, relevan, dan dapat dibandingkan Anima, dkk (2020) Kompetensi Sumberdaya Manusia yang baik

dapat membantu jalannya pemerintahan yang sesuai dengan Undang-Undang maupun peraturan pemerintah yang berlaku (Kristian, 2020).

Penelitian yang dilakukan oleh Wati, dkk (2014) Janna (2019) Hermalinda (2018) menyimpulkan bahwa kompetensi sumber daya manusia berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan. Namun berbeda dengan Penelitian yang dilakukan oleh Latifa (2017) Wardani dkk (2018) Adah dan Nazrulloh (2021) menyimpulkan bahwa kompetensi sumber daya manusia tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

Penelitian ini mengembangkan penelitian Rohmah, dkk (2020). Peneliti menambahkan variabel kompetensi sumber daya manusia sebagai variabel independen, hal ini karena kompetensi sumber daya manusia merupakan faktor yang penting dalam menentukan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

Berdasarkan inkonsistensi hasil-hasil penelitian terdahulu, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian untuk menguji kembali **“Pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi Akuntansi, Pengendalian Internal, dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah”**

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka masalah penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:

1. Apakah pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah?
2. Apakah sistem pengendalian internal berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan?

3. Apakah kompetensi sumber daya manusia berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah, penelitian ini bertujuan untuk menemukan bukti empiris tentang:

1. Pengaruh pemanfaatan teknologi informasi terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah
2. Pengaruh sistem pengendalian internal terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah
3. Pengaruh kompetensi sumber daya manusia terhadap kualitas pemerintah daerah

1.4. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan peneliti, adapun manfaat penelitian yang diperoleh adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis
 - a. Akademisi,
Penelitian ini bermanfaat untuk menambah pengetahuan khususnya terkait kualitas laporan keuangan daerah.
2. Manfaat Praktis
 - b. SKPD di lingkungan Pemda Kota Ternate, sebagai bahan pertimbangan dan referensi dalam menyajikan laporan keuangan yang berkualitas.